

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR 2019

WELFARE OF MAKASSAR MUNICIPALITY 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR**

**INDIKATOR KESEJAHTARAAN RAKYAT
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2019**

**No Publikasi : 71520.1503
Katalog : 4101004.71
Ukuran Buku : 8,5" x 11"**

**Pembina : Kepala BPS Kota Makassar
Pengarah : Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

Tim Penyusun : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Lay Out : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR
Jl. Abdurahman Basalamah I Makassar 90231
Telp. 0411 442698
Fax. 0411 442698
e-mail: bps7371@bps.go.id
Homepage: <http://makassarkota.bps.go.id>**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2019 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator lainnya. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Kami menyadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menganalisis dan merencanakan berbagai kegiatan untuk pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Makassar, November 2019

Badan Pusat Statistik

Kota Makassar

Kepala,

Ir. Ari Prihandini, M.Si

NIP. 196802221994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ISTILAH TEKHNIS	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Konsep dan Defenisi	3
1.5. Sumber Data	5
1.6. Sistimatika Penulisan	6
BAB II KEPENDUDUKAN.....	8
2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	8
2.2. Pertumbuhan Penduduk.....	10
2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk	11
2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	13
2.5. Sex Ratio	15
2.6. Status Perkawinan	16
BAB. III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA.....	18
3.1. Pemakain Alat/Cara KB.....	19
BAB IV KESEHATAN.....	22
4.1. Status Kesehatan Masyarakat.....	22
4.2. Keluhan Kesehatan	23
4.3. Derajat Kesehatan	23
4.4. Penolong Persalinan	24
4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	25
4.6. Sarana Kesehatan	26
BAB V PENDIDIKAN.....	28
5.1. Sarana Pendidikan	28
5.2. Rasio Murid Guru.....	29

5.3. Rasio Murid Sekolah.....	30
5.4. Angka Partisipasi Sekolah.....	31
5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf).....	32
5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki	34
BAB VI KETENAGAKERJAAN	37
6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	38
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	38
6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan.....	40
6.4. Status Pekerjaan.....	41
6.5. Lama Jam Bekerja.....	43
BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	44
7.1. Status Penguasaan Rumah	44
7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal	45
7.3. Fasilitas Tempat Tinggal	50
BAB VIII INDIKATOR LAINNYA	55
8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita	55
8.2. Kemiskinan	57
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ISTILAH TEKHNIS

Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi

Rasio Dan Jenis Kelamin

Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Besarnya probabilitas bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).

Angka Harapan Hidup (AHH) Pada Waktu Lahir

Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu

memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Dependency Ratio/Angka Beban Tanggungan (ABT).

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka Buta Huruf

Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materiil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang- undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, menghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan

untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Disinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.2. Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2016 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang).

1.3. RuangLingkup

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi

aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

1.4. Konsep dan Defenisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah:

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

Rumah Tangga Khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

Kepadatan penduduk adalah rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandinganantara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Metode Kontrasepsi adalah alat/cara pencegah kehamilan.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak atau Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

Tidak Sekolah lagi adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Melek Huruf adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Angka partisipasi Sekolah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Bekerja adalah Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Menganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang

mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun keatas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{15+}} \times 100$$

Keterangan :AK = Angkatan Kerja

P₁₅₊= Penduduk usia 15 tahun keatas

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100\%$$

Keterangan :PT = Tingkat Pengangguran Terbuka

TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan

AK = Jumlah Angkatan Kerja

Angka Beban Tanggungan adalah Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

Penduduk Muda adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

Penduduk Tua adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

1.5. Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumahtangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumahtangga, ferilitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi sarana kesehatan, keluhan kesehatan, penolong persalinan, serta pemberian ASI.

Bab keempat, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab kelima, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab keenam, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab ketujuh, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.

<https://makassarkota.bps.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta non profit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.526.677 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 755.968 jiwa dan perempuan 770.709 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan

perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 98,09. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 15 kecamatan terdiri dari 153 kelurahan dengan total luas 175,77 km², sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2019 sekitar 8.686 jiwa per km². Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang mencapai 8.580 jiwa per km².

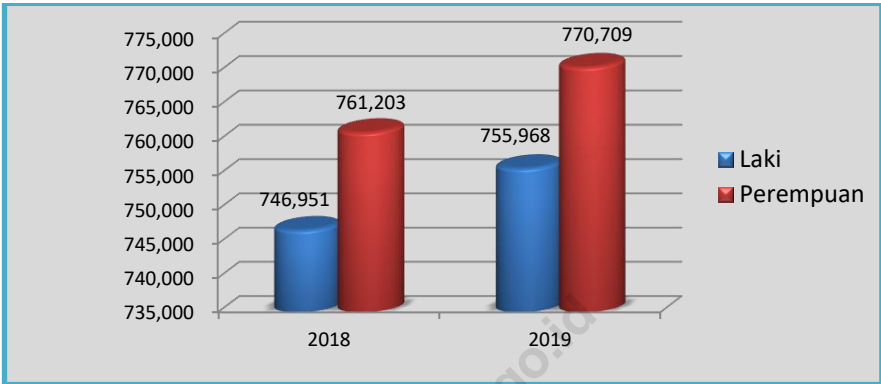
Tabel 2.1
Penduduk Kota Makassar Tahun 2018 dan 2019

Uraian	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	1.508.154 jiwa	1.526.677 jiwa
- Laki-laki	746.951 jiwa	755.968 jiwa
- Perempuan	761.203 jiwa	770.709 jiwa
Rasio Jenis Kelamin	98,13	98,09
Kepadatan penduduk	8.580 jiwa/km ²	8.686 jiwa/km ²

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Tahun 2018-2019

Gambar 1

Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019



2.2. Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2018 dan 2019 sebesar 1,29 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 0,90 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan Tahun 2018 dan 2019

wilayah	2018	2019	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.508.154 jiwa	1.526.677 jiwa	1,29
Provinsi Sulawesi Selatan	8.771.970 jiwa	8.851.240 jiwa	0,90

Sumber : Makassar Dalam Angka 2019, BPS

2.3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 tercatat 1.526.677 jiwa yang tersebar pada 15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.580,27 jiwa perkilometer. Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.601,51 jiwa/km² di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 33.853,57 jiwa/km² di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat enam kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km², Tamalanrea 31,84 Km², Manggala 24,14 Km² dan Tamalate 20,21 Km².

Pada Tabel 2.3 terdapat distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar

14,22 persen, Tamalate 13,39 persen, Rappocini 11,16 persen, Panakkukang 9,89 persen.

Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.

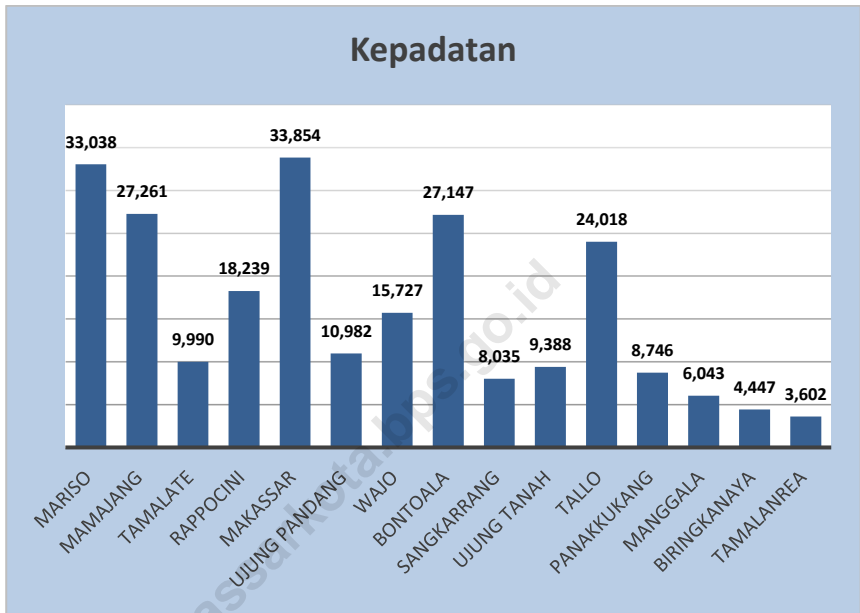
Tabel 2.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah(Km2)	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mariso	1,82	1,04	60.130	3,99	33.038,46
02. Mamajang	2,25	1,28	61.338	4,07	27.261,33
03. Tamalate	20,21	11,50	201.908	13,39	9.990,50
04. Rappocini	9,23	5,25	168.345	11,16	18.238,89
05. Makassar	2,52	1,43	85.311	5,66	33.853,57
06. Ujung Pandang	2,63	1,50	28.883	1,92	10.982,13
07. Wajo	1,99	1,13	31.297	2,08	15.727,14
08. Bontoala	2,10	1,19	57.009	3,78	27.147,14
09. Ujung Tanah	4,40	2,50	35.354	2,34	8.035,00
10. Sangkarrang	1,54	0,88	14.458	0,96	9.388,31
10. Tallo	5,83	3,32	140.023	9,28	24.017,67
11. Panakkukang	17,05	9,70	149.121	9,89	8.746,10
12. Manggala	24,14	13,73	145.873	9,67	6.042,79
13. Biringkaya	48,22	27,43	214.432	14,22	4.446,95
14. Tamalanrea	31,84	18,11	114.672	7,60	3.601,51
Jumlah	175,77	100,00	1.508.154	100,00	8.580,27

Sumber : Makassar Dalam Angka 2018, BPS

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biringkanya, Tamalanrea dan Manggala.

Grafik 2
Distribusi Penduduk Kota Makassar per kecamatan Tahun 2018



2.4. Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya dependency ratio (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut “beban ketergantungan”. Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2018 sebesar 41,22 dan turun menjadi 41,02 pada tahun 2019. Angka tersebut pada tahun 2019 memberikan gambaran bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 41 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2019 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 th.

Tabel 2.4
Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2018 – 2019 (%)

Angka Beban Ketergantungan	2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)	37,04	34,71	35,86	36,67	34,46	35,55
Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)	4,52	6,18	5,36	4,62	6,30	5,47
Total	41,56	40,89	41,22	41,29	40,76	41,02

Sumber : Makassar Dalam Angka 2019, BPS

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan angka beban tanggungan penduduk tua.

Dalam kurun 2018-2019 angka beban tanggungan penduduk muda mengalami penurunan sebesar 0,31 persen sedangkan angka beban tanggungan penduduk tua meningkat sebesar 0,11 persen. Namun demikian penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,36 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 5,47.

2.5. Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 sebesar 98,09, artinya di Kota Makassar terdapat 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok penduduk tua (65+) sex rasionya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Makassar 2018-2019

Kelompok Umur	2018			2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	70.610	67.533	104,56	70.564	67.582	104,41
5 - 14	124.852	119.981	104,06	125.650	121.086	103,77
15 - 64	527.664	540.293	97,66	535.044	547.535	97,72
65 +	23.825	33.396	71,34	24.710	34.506	71,61
Total	746.951	761.203	97,91	755.968	770.709	98,09

Sumber : Makassar Dalam Angka 2019, BPS

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

2.6. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati.

Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2018 dan 2019. Nampak

bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 1,37 persen selama tahun 2018-2019, yaitu dari 48,99 persen menjadi 47,62 persen. Persentase status perkawinan cerai hidup dan cerai mati mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 1,1 persen, sedangkan penduduk perempuan juga mengalami penurunan sebesar 1,63 persen. Selama tahun 2018-2019, persentase penduduk belum kawin di Kota Makassar naik sebesar 0,88 persen.

Tabel 2.6
 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Kota Makassar 2018-2019

Status Perkawinan	2018			2019		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	46,70	39,90	43,25	48,15	40,25	44,13
Kawin	49,28	48,72	48,99	48,18	47,09	47,62
Cerai	4,03	11,38	7,76	3,68	12,66	8,25

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018-2019

BAB. III

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Fertilitas dalam demografi didefinisikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup. Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Fertilitas dapat dipengaruhi oleh keadaan dari wanita itu sendiri yakni secara kodrati wanitalah yang mengalami reproduksi. Keadaan wanita tersebut diantaranya ditinjau dari usia, tingkat pendidikan, usia perkawinan pertama, penggunaan alat kontrasepsi dan lain-lain. BPS membatasi pada wanita pernah kawin berusia 15 hingga 49 tahun dikarenakan usia tersebut merupakan usia subur bagi seorang wanita sehingga kemungkinan seorang wanita dapat melahirkan anak cukup besar dalam rentang usia tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tingkat fertilitas diantaranya pemberian batasan usia pernikahan dan program Keluarga Berencana (KB). Pemberian batasan usia tersebut dimaksudkan agar wanita menunda usia perkawinan mereka sehingga dapat memperpendek masa reproduksinya.

Perempuan yang kawin pada usia yang terlalu muda cenderung beresiko lebih tinggi selama masa kehamilan dan persalinan dibandingkan dengan wanita yang sudah berada pada usia matang (lebih dari 20 tahun). Resiko selama kehamilan dan persalinan akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dengan menunda usia kawin diharapkan wanita dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi atau pun bekerja sehingga memiliki bekal yang cukup, baik material maupun spiritual untuk berumah tangga kelak.

Program KB merupakan program yang dikeluarkan pemerintahan untuk membatasi jumlah kelahiran. Hal tersebut dimaksudkan agar beban yang harus ditanggung oleh rumah tangga tidak terlampaui besar atau sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Jumlah anak yang terbatas juga akan sangat menguntungkan karena ibu dapat memfokuskan perhatian kepada anak-anak mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan dari rumah tangga yang terprogram dengan baik tersebut akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk kelanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

3.1. Pemakaian Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 3.1 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Selama kurun waktu 2017-2018, persentase penduduk yang sedang ikut menggunakan alat/cara KB mengalami peningkatan sekitar 11,53 persen yakni dari 33,95 persen di tahun 2017 menjadi 45,18 persen di tahun 2018.

Tabel 3.2

Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Menikah menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2017 - 2018

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	33,95	43,79	22,26
2018	45,18	16,15	38,67

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017-2018

Tabel 3.4 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Pemakaian jenis kontrasepsi seperti MOW/MOP, AKDR/IUD, susuk KB, Pil KB dan alat kontrasepsi lainnya terlihat mengalami peningkatan pemakaian alat/cara KB tahun 2016, sedangkan penggunaan jenis kontrasepsi yang mengalami penurunan paling besar adalah KB Suntikan yakni turun sebesar 13,89 persen. Namun penggunaan alat kontrasepsi yang paling digemari oleh sebagian besar wanita yang berstatus kawin adalah KB Suntikan mencapai 36,33 persen, diikuti oleh kondom sebesar 27,78 persen, dan KB pil sebesar 17,20 persen.

Banyaknya akseptor yang menggunakan KB suntikan bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Sedangkan untuk penggunaan pil KB, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan, akan tetapi dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB.

Tabel 3.3
 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis
 Alat Kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2017 - 2018

Jenis Kontrasepsi	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(5)	(3)
MOW/MOP	3,32	3,32
AKDR/IUD	9,16	8,45
Suntikan	50,22	36,33
Susuk	5,05	5,78
Pil	17,94	17,20
Kondom	0,35	27,78
Lainnya	3,03	4,44

Sumber : BPS Kota Makassar ,Susenas 2017-2018

BAB IV KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

4.1. Status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

4.2. Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh.

Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 13,68 persen, naik jika dibandingkan tahun 2018 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 13,42 persen, hal ini menunjukkan agar masyarakat dapat lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan lebih baik lagi.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2018 - 2019

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	12,68	14,14	13,42
2019	13,06	14,27	13,68

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2015 - 2016

4.3. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan, akan tergambar masalah kesehatan yang sedang dihadapi suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor keturunan/genetis, pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) disebut juga lama hidup seseorang/sekelompok orang yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Selain itu, AHH merupakan suatu alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu

wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.2
 Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit di Kota Makassar, 2018

Jumlah Hari Sakit	2018		
	L	P	L+ P
(1)	(5)	(6)	(7)
1 - 3	31,81	36,15	34,56
4 - 6	28,83	33,58	31,83
7 - 29	37,69	27,23	31,07
30 +	1,66	3,04	2,53

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018

4.4. Penolong Persalinan

Penolong persalinan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan diyakini lebih baik dibandingkan tenaga non medis.

Penolong persalinan dapat dijadikan indikator bidang kesehatan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak serta mutu pelayanan kesehatan secara umum. Tempat persalinan yang khusus disertai dengan peralatan yang baik dan ditolong oleh petugas yang terampil, diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan tempat bersalin di rumah, dengan peralatan sederhana dan ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 4.3
 Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut
 Penolong kelahiran anak yang terakhir di Kota Makassar 2017–2018

Tahun	Penolong persalinan Terakhir	
	Dokter Kandungan/ Dokter Umum	Bidan/ Paramedis/Lainnya
(1)	(2)	(3)
2015	68,00	32,00
2018	57,65	43,35

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017–2018

Penolong persalinan di Kota Makassar selama kurun waktu 2015 - 2016 dengan pemanfaatan tenaga dokter sebagai penolong persalinan mengalami penurunan menjadi 57,65 persen pada tahun 2018 dibanding tahun 2017, sedangkan pemanfaatan tenaga bidan, paramedis dan lainnya mengalami peningkatan dari 32,00 persen pada tahun 2017 menjadi 43,35 persen di tahun 2018. Termasuk dalam kategori ini masyarakat yang memanfaatkan dukun sebagai penolong kelahiran. Hal ini perlu dikaji lebih dalam guna mendapat faktor-faktor penyebabnya, apakah karena akses ke tenaga medis masih sulit atau faktor biaya persalinan yang mahal.

4.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Sekarang ini pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan menyosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini karena dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu terhadap kesehatan anak. Tabel 4.4 memperlihatkan

persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah disusui dan rata-rata lama menyusui di Kota Makassar.

Jika dilihat dari Tabel 4.4 terlihat bahwa anak berusia kurang dari dua tahun (baduta) yang pernah diberi ASI sebanyak 94,02 persen. Ini berarti menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi. Jika dilihat dari karakteristiknya, 100 persen baduta perempuan pernah diberi ASI sedangkan baduta laki-laki hanya 88,16. Rata-rata lama pemberian ASI untuk baduta di Kota Makassar adalah 8 bulan.

Tabel 4.4

Persentase Anak Berusia Kurang dari 2 tahun (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2019

Karakteristik	Persentase Baduta Pernah Diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	88,16	8
Perempuan	100,00	8
Total	94,02	8

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2019

4.6. Sarana Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas

layanan kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.5
Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2018

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(3)
Rumah Sakit Umum/Khusus	25
Rumah Sakit Bersalin	24
Puskesmas	46
Balai Pengobatan/Klinik	182
Posyandu	1.010

Sumber : Dinkes Kota Makassar (Potret Kota Makassar 2019)

BAB V

PENDIDIKAN

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui konsep “link and match”, yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

5.1. Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling

dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

5.2. Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1
Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2018/2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/Sederajat	140.595	6.802	20
S M P/ sederajat	63.318	3.539	17
S MA/Sederajat	65.758	4.400	15

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Makassar (Potret Kota Makassar 2019)

Tabel 5.1 menunjukkan nilai rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/sederajat pada tahun ajaran 2018/2019 yaitu 20 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 20 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 17 atau terdapat sekitar 17 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/sederajat sekitar 15 atau terdapat sekitar 15 murid diajar oleh seorang guru.

5.3. Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Pada tahun ajaran 2018/2019 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 280 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 304 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 303 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2018/2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/ Sederajat	140.595	502	280
S M P/ sederajat	63.318	208	304
S MA/ Sederajat	65.758	217	303

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Makassar (Potret Kota Makassar 2019)

5.4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun
Kota Makassar 2018

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	99,21	91,84	69,02
Perempuan	99,28	92,70	74,33
Total	99,24	92,25	71,91

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. Keadaan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2018 mencapai 99,24 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 99 penduduk yang masih aktif bersekolah. Untuk penduduk usia ini,

partisipasi sekolah penduduk perempuan besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 99,21 persen laki-laki dan perempuan sekitar 99,28 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 92,25 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 92,70 persen untuk perempuan dan 91,84 persen untuk laki-laki.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 71,91 persen. Perbedaan yang cukup juga terjadi pada partisipasi penduduk perempuan yang lebih tinggi dari pada partisipasi penduduk laki-laki. Partisipasi penduduk perempuan sebesar 74,33 persen, sedangkan partisipasi penduduk laki-laki sebesar 69,02 persen.

Adanya program pendidikan gratis di Kota Makassar untuk sekolah SD dan SMP telah meningkatkan angka partisipasi sekolah di kota ini. Kemudian jika masih ada penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, sangat perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian perlu pembuktian lebih dalam dugaan bahwa penduduk usia sekolah 7-18 tahun di Kota Makassar banyak diantaranya yang putus sekolah karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan mereka lebih memilih masuk dalam angkatan kerja (bekerja) membantu kegiatan ekonomi orang tua.

5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator ketertinggalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kepandaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2018 – 2019 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2019 sekitar 97,75 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, atau naik sekitar 0,08 persen dari keadaan tahun 2018 yang mencapai 97,67 persen.

Telah lebih lanjut menurut jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis sekitar 96,65 persen tahun 2019 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 98,90 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 2,25 persen, hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,33 persen karena itu harus terus dilakukan peningkatan kinerja program pendidikan, sehingga semakin meminimalkan penduduk yang buta huruf.

Tabel 5.6
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Makassar
2018-2019

Jenis Kelamin	2018		2019	
	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,05	1,95	98,90	1,10
Perempuan	97,31	2,69	96,65	3,35
Laki-laki + Perempuan	97,67	2,33	97,75	2,25

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018 – 2019

5.6. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

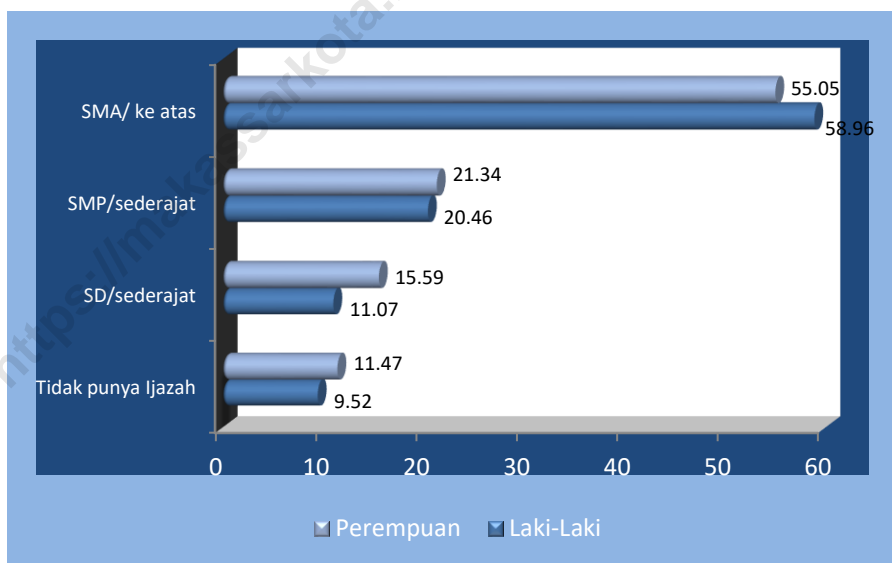
Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2019. Bahwa sebagai ibukota provinsi pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk yang berusia 15 tahun ke atas berijazah SMA/ ke atas sebesar 56,96 persen. Sementara penduduk Kota Makassar yang berijazah SD/ sederajat sebesar 11,61 persen, berijazah SMP/ sederajat sebesar 20,91, dan tidak memiliki ijazah sebesar 10,52 persen. Selengkapnya pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5.7
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2019

Pendidikan Yang Ditamatkan	2019		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah	9,52	11,47	10,52
SD/ sederajat	11,07	12,14	11,61
SMP/ sederajat	20,46	21,34	20,91
SMA/ ke atas	58,96	55,05	56,96

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2016

Grafik 4
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2019



BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauhmana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep Labour Force Approach dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat digolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk menghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah

pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal berbagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2017 dan 2018. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja sekitar 52,23 persen penduduk usia 15 tahun keatas tergolong bekerja dan sekitar 7,26 persen yang sedang mencari pekerjaan pada tahun 2018.

Tabel 6.1
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu
Yang Lalu, Di Kota Makassar, 2017 dan 2018

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	49,38	5,85	12,53	27,24	5,00
2018	52,23	7,26	14,06	21,52	4,93

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2014 dan 2015

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas Di Kota Makassar 2018 dan 2019

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(4)
2018	59,49	12,19
2019	57,77	10,39

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2018 dan 2019

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2018 dan 2019. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK dan TPT. Pada tahun 2018 TPAK penduduk Kota Makassar sekitar 59,49 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 59 orang penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka TPAK Kota Makassar mengalami penurunan menjadi 57,77.

Sementara itu, TPT kota Makassar pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan 2018, yaitu dari 12,19 menjadi 10,39. Seperti di negara-negara berkembang, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran pada tahun 2015-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 TPT laki-laki naik sebesar 4,29 persen dibanding tahun 2015, sementara TPT perempuan justru turun sebesar 4,14 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan TPT di Kota

Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2015, sektor perdagangan menyerap 189.168 orang pekerja di kota Makassar dan sektor jasa-kemasyarakatan sebesar 169.901 pekerja. Selama tahun 2016 alokasi lapangan usaha sebagai tanda aktifitas ekonomi di Kota Makassar nampak terjadi pergeseran, meski sektor perdagangan dan jasa masih mendominasi. Pada sektor perdagangan terjadi penurunan daya serap dimana tahun 2016 menyerap 180.969 atau turun sebesar 4,75 persen. Namun sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 54,30 persen yaitu mampu menyerap 27.484 pekerja di tahun 2015 dan di tahun 2016 naik menjadi 42.410 pekerja.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar, 2017 – 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	2017			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan perikanan	17.007	1.300	18.307	15.479	2.573	18.052
Industri Pengolahan	34.762	17.448	52.210	38.039	22.021	60.060
Perdagangan Besar, Eceran,	101.749	93.406	195.155	88.445	119.776	208.221
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	91.374	60.054	151.428	76.379	65.192	141.571
Lainnya *)	113.505	17.763	131.268	140.666	20.651	161.317

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2017-2018

Catatan: Lainnya*) Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Tabel 6.4
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama seminggu
Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2018

Jenis Pekerjaan	2018		
	L	P	L+P
(1)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Profesional	20.290	7.428	27.718
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	23.645	30.519	54.164
Tenaga Tata Usaha dan sejenisnya	22531	8.379	30.910
Tenaga Usaha Penjualan	33.361	29.512	62.873
Tenaga Usaha Jasa	91.507	112.607	204.114
Tenaga Usaha Pertanian	10.922	1.820	12.742
Tenaga Produksi, Operator Alat angkutan dan Pekerja Kasar	156.752	39.948	196.700
Lainnya	359.008	230213	589.221

Sumber: BPS Kota Makassar, Sakernas 2018

Berdasarkan tabel 6.4 terlihat bahwa sebagian besar tenaga kerja kota Makassar terserap di tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar, yaitu sebanyak 196.700 orang. hal ini dikarenakan sektor industri merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk produk domestik regional bruto Kota Makassar. Sementara itu, yang paling sedikit merupakan tenaga usaha pertanian, yaitu 12.742 orang.

6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat

dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas. Status pekerjaan ini juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2016, pekerja formal di Kota Makassar sebesar 343.575 orang dimana pekerja laki-laki sebesar 60,69 dan pekerja perempuan sebesar 39,31 persen. Sementara pada sektor informal 178.279 hal ini ditunjukkan melalui penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Dimana pekerja laki-laki sebesar 64,38 persen dan pekerja wanita sebesar 35,62 persen.

Tabel 6.5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar, 2015

Status Pekerjaan Utama	2017			2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	69.335	44.121	113.456	63.785	56.537	120.322
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	10.159	14.887	25.046	10.245	15.738	25.983
Berusaha dibantu buruh tetap	23.853	7.003	30.856	21.811	5.859	27.670
Buruh/karyawan	233.046	109.711	342.757	222.063	133.457	355.520
Pekerja bebas di pertanian	2.745	0	2.745	2.494	0	2.494
Pekerja bebas di non pertanian	7.514	997	8.511	30.934	9	30.943
Pekerja keluarga	11.745	13.252	24.997	7.676	18.613	26.289
Jumlah	358.397	189.971	548.368	359.008	230.213	589.221

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2015

6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 488.575 orang penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 312.103 orang laki-laki dan 176.472 orang perempuan pada tahun 2016.

Tabel 6.6

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2018

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2018		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0	8.576	5.103	13.679
1 – 14	6.163	13.752	19.915
15 – 34	32.166	34.886	67.052
35 +	312.103	176.472	488.575
Jumlah	359.008	230.213	589.221

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2018

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

7.1. Status Penguasaan Rumah

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar pada tahun 2018 dan 2019. Selama kurun

waktu 2018-2019, nampak terjadi peningkatan pada penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri. Pada tahun 2018, bangunan tempat tinggal yang ditinggali oleh pemiliknya sendiri mencapai 57,60 persen, kemudian naik menjadi 58,68 persen di tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 31,78 persen rumah tangga belum mempunyai rumah milik sendiri.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara.

Tabel 7.1
Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kota Makassar, 2018– 2019

Status Penguasaan	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	57,60	58,68
Bukan Milik Sendiri	42,40	41,32

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2018– 2019

7.2. Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata- rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan

standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m² maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m².

Keadaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2018 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m² sekitar 8,45 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m² sekitar 24,99 persen. Sementara itu, rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m², yakni mencapai 34,77 persen, sedangkan rumahtangga dengan lantai terluas 100 m² keatas mencapai 31,79 persen.

Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, tampaknya masih perlu perhatian dari pihak terkait yang ditujukan terutama bagi rumahtangga yang menempati bangunan luas lantai yang relatif sempit.

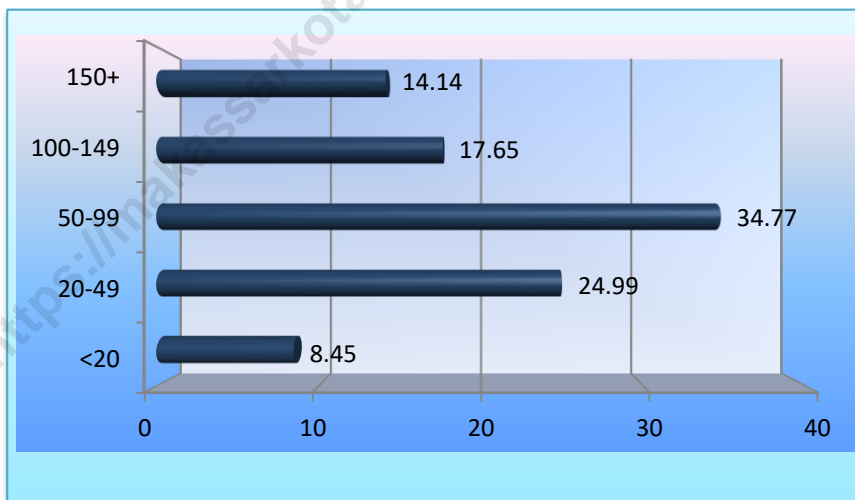
Tabel 7.2 memperlihatkan kondisi fisik bangunan yang ditempati oleh rumahtangga di Kota Makassar. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2017-2018 distribusi rumahtangga menurut kondisi fisik bangunan tempat tinggal di Kota Makassar mengalami perubahan yang cukup baik terlihat dengan semakin menurunnya rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai < 20 meter persegi dan semakin meningkat jumlah rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai > 100 meter persegi.

Tabel 7.2
 Persentase Rumah tangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2017
 dan 2018

Luas Lantai	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- < 20	11,92	8,45
- 20 – 49	22,42	24,99
- 50 – 99	33,42	34,77
- 100 – 149	14,41	17,65
- 150 +	17,83	14,14

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 dan 2018

Grafik 5
 Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai Kota Makassar
 Tahun 2018

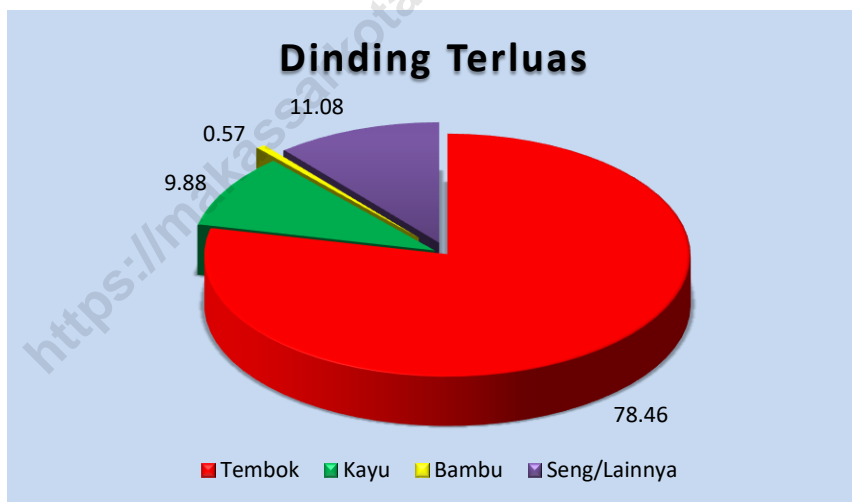


Tabel 7.3
 Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar
 Tahun 2017 dan 2018

Jenis Dinding	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- Tembok	82,67	78,46
- Kayu	9,47	9,88
- Bambu	0,36	0,57
- Seng/Lainnya	7,50	11,08

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 dan 2018

Grafik 6
 Persentase Rumah tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar
 Tahun 2018



Keadaan rumah tangga menurut dinding terluas tahun 2017 dan 2018 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah

tangga sudah berupa tembok, yaitu sebesar 78,46 persen, berupa kayu sebesar 11,08 persen, berupa bambu 0,57 persen dan jenis dinding lainnya sebesar 9,88 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

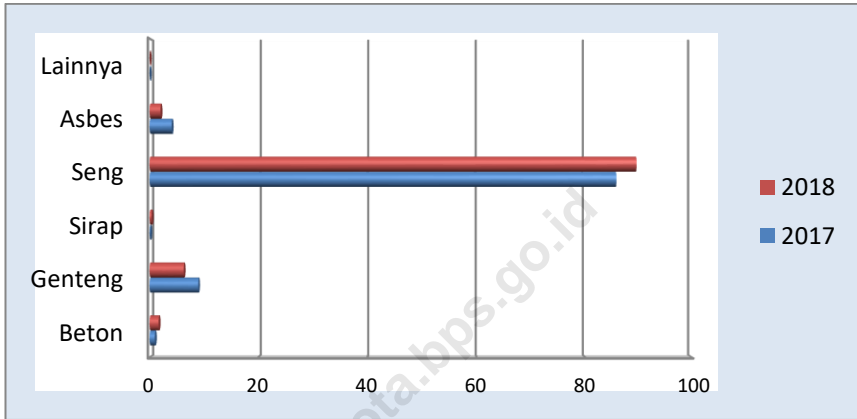
Pada tahun 2018 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 89,68 persen naik 1,51 persen dari tahun 2015.

Tabel 7.4
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2017 - 2018

Jenis Atap	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- Beton	0,96	1,66
- Genteng	8,94	6,28
- Sirap	0,12	0,37
- Seng	85,91	89,68
- Asbes	4,06	2,01
- Lainnya	0,01	-

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 - 2018

Grafik 7
Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018



Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering / tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau plur/semén (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

7.3. Fasilitas Tempat Tinggal

7.3.1. Sumber Air Minum

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin banyak rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya

rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahteraannya. Air minum yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air didistribusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang digunakan oleh rumahtangga tersebut.

Rumahtangga di Kota Makassar tahun 2018 yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan masing-masing persentasenya sebesar 61,00 persen dan 29,50 persen. Sedangkan yang menggunakan air sumur bor/pompa sebagai sumber air minum yaitu sekitar 3,67 persen, air sumur terlindung sekitar 1,52 persen dan sumur tak terlindung sekitar 0,15 persen.

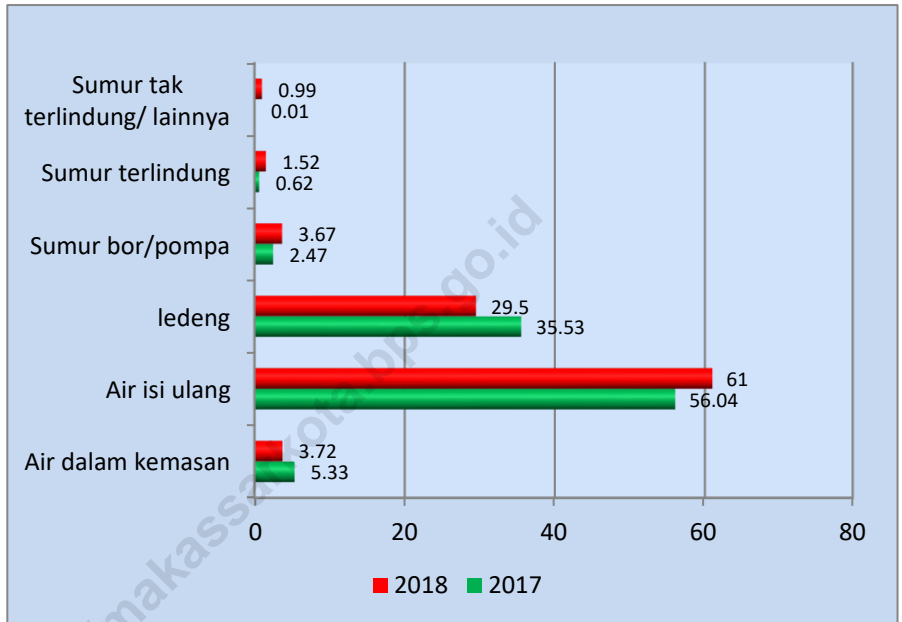
Tabel 7.5
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota
 Makassar Tahun 2017-2018

Sumber Air Minum (1)	2017 (3)	2018 (5)
- Air dalam kemasan	5,33	3,72
- Air isi ulang	56,04	61,00
- Ledeng	35,53	29,50
- Sumur bor/pompa	2,47	3,67
- Sumur terlindung	0,62	1,52
- Sumur tak terlindung/Lainnya	0,01	0,99

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017-2018

Grafik 8

Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar Tahun 2017 dan 2018



7.3.2. Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari tabel 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2017 sebesar 85,55 persen dan 83,66 persen tahun 2018, sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar rumahtangga yang digunakan bersama pada tahun 2017 sebesar 13,76 persen dan 10,13 persen tahun 2018. Selebihnya untuk fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh rumanhtangga dengan fasilitas buang air besar ditempat umum sebesar 1,87 persen di tahun 2017 dan di tahun 2018 sebesar 5,01 persen.

Tabel 7.6

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar Tahun 2017 - 2018

Fasilitas Tempat Tinggal	2017 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
Fasilitas Tempat BAB		
- Sendiri	83,55	83,66
- Bersama/Komunal	13,76	10,12
- Umum	1,87	5,01
- Tidak ada	0,82	1,20
Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
- Tangki/SPAL	99,35	99,06
- Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	0,14	0,67
- Lubang Tanah/ Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	0,51	0,27

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2017 dan 2018

7.3.3. Fasilitas Penerangan

Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar rumahtangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non PLN. Untuk tahun 2018 yaitu sekitar 94,71 persen sudah menggunakan sumber

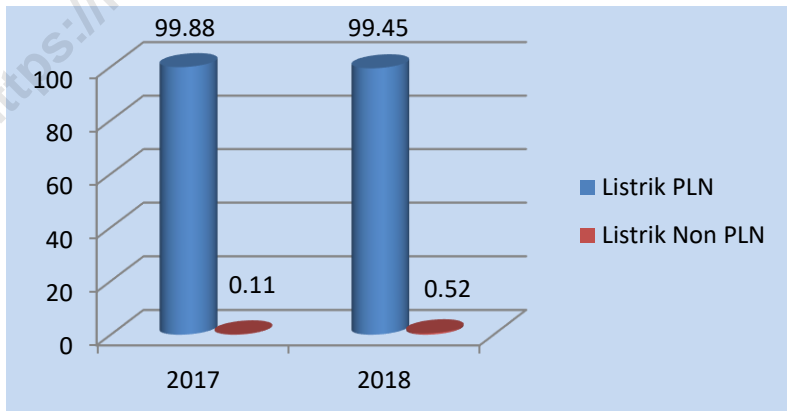
penerangan listrik dari PLN dan rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Genset) utamanya masyarakat atau rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah Pulau yaitu sekitar 1,38 persen.

Tabel 7.7
 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota
 Makassar Tahun 2015 dan 2016

Fasilitas Penerangan	2015 (%)	2018 (%)
(1)	(2)	(3)
- Listrik PLN	99,71	94,71
- Listrik PLN non meteran	0,17	4,78
- Listrik non PLN	0,11	0,52
- Pelita/Lainnya	-	-

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2015 dan 2016

Grafik 9
 Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota
 Makassar Tahun 2015 dan 2016



BAB VIII INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

8.1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita

Tabel 8.1 menggambarkan perkembangan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita. Terlihat tahun 2018 persentase pengeluaran penduduk perkapita terbesar pada golongan pengeluaran diatas Rp. 1.500.000 yaitu sebesar 42,11 persen dan terendah pada golongan pengeluaran Rp. 150.000 – Rp. 199.999 sebesar 0,89 persen. Dari tabel ini juga tergambar bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran semakin besar persentase penduduk per kapita.

Tabel 8.1
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per
Bulan Kota Makassar Tahun 2018

No.	Golongan pengeluaran	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
1.	< 150.000	-
2.	150.000 – 199.999	0,89
3.	200.000 – 299.999	2,57
4.	300.000 – 499.999	9,14
5.	500.000 – 749.999	12,19
6.	750.000 – 999.999	12,63
7.	1.000.000 – 1.499.999	20,47
8.	1.500.000 +	42,11
	JUMLAH	100,00

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2016

Pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Kota Makassar pada tahun 2018 mencapai Rp 1.576.103.

Tabel 8.2
Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan Kota Makassar Tahun 2016-2018

Tahun	Persentase	
	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)
2017	39,93	60,07
2018	43,74	56,26

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2017-2018

Secara umum pergerakan yang terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 terlihat bahwa konsumsi bukan makanan mendominasi struktur konsumsi penduduk Kota Makassar. Bila melihat komposisi pola konsumsi masyarakat Kota Makassar tahun 2017 – 2018 terlihat bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan tahun 2017 ke tahun 2018 bergerak dari 39,93 persen menjadi 43,74 persen dan konsumsi non makanan bergerak dari 60,07 persen menjadi 56,26 persen. Peningkatan konsumsi makanan disebabkan karena banyaknya produk makanan baru sehingga antusiasme masyarakat tinggi untuk mencoba hal baru. Selain itu, adanya *GrabFood* dan *GoFood* juga mendorong peningkatan konsumsi makanan di Kota Makassar karena mempermudah masyarakat dalam berbelanja makanan.

Jika melihat besarnya pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan maka dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita penduduk kota Makassar untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan

pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat relative lebih baik.

8.2. Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara layak, secara konseptual disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan defenisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang

menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

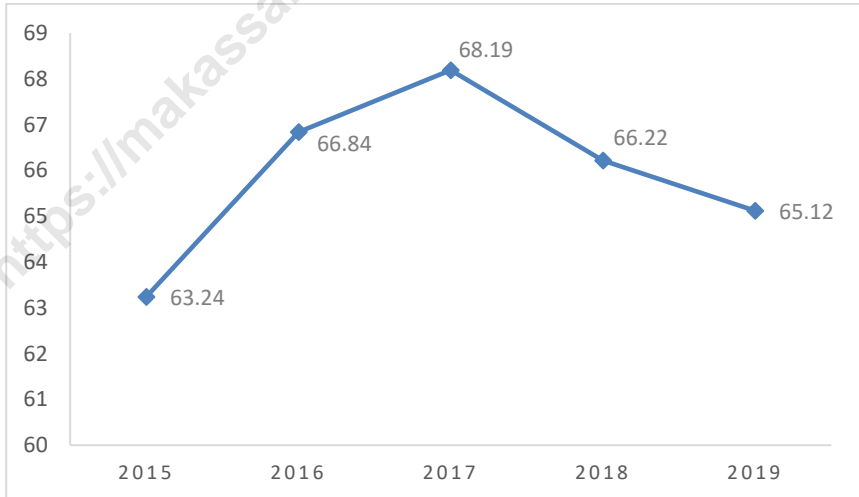
Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 8.2
 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota
 Makassar Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Pend.Miskin (000)	63,24	66,84	68,19	66,22	65,12
Persentase pend.Miskin (%)	4,36	4,56	4,59	4,41	4,28
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	321.094	347.723	366.430	386.545	418.831

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2011-2016

Grafik 10
 Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2015-2019 (Ribu Jiwa)



Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2018. Secara absolut jumlah penduduk miskin turun pada periode 2019 sebesar 1100 ribu jiwa, yaitu 66,22 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 65,12 ribu jiwa pada tahun 2019.

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2015 dan tahun 2019. Analisis ini mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan.

8.2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, khusus di Kota Makassar pada tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.97.737,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 321.094,- pada tahun 2015 menjadi Rp.418.831 tahun 2019,-.

8.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2019 sebesar 65,12 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan sebanyak 1,1 ribu jiwa dari tahun 2018, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 66,22 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yang mencapai angka 8.772 ribu jiwa, kota Makassar merupakan Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat kedua jumlah terbanyak penduduk miskinnya setelah kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Sul-Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2015), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2016), Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2016 Provinsi Sulawesi Selatan, 2016
- BPS, Kota Makassar, Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2011-2016, Makassar
- BPS, Kota Makassar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2011-2016, Makassar